PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS LAMPUNG**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALBET MAYDIANTORO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **900962**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.760.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
3. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 823 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 304.500.000

1. MOBIL, PAJERO SPORT JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 47.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	75.296.674
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.186.796.674
III.	HUTANG	Rp.	747.513.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.439.283.674

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.